



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1300, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Melawi Prov. Kalbar
dengan Kabupaten Lamandau Prov. Kalteng.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah

Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Melawi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Kabupaten Lamandau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 13,189''$ LS dan $111^{\circ} 20' 29,345''$ BT;
2. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.02 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 47,311''$ LS dan $111^{\circ} 21' 03,664''$ BT , TK.02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.03 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 34,803''$ LS dan $111^{\circ} 21' 52,607''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.04 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 24,509''$ LS dan $111^{\circ} 22' 19,267''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada

TK.05 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 46,910''$ LS dan $111^{\circ} 23' 1,887''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.06 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 42,782''$ LS dan $111^{\circ} 22' 52,622''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.07 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 46,542''$ LS dan $111^{\circ} 23' 19,960''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.08 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 10,294''$ LS dan $111^{\circ} 23' 26,965''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.09 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 9,115''$ LS dan $111^{\circ} 24' 8,109''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.10 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 46,456''$ LS dan $111^{\circ} 24' 0,353''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.11 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 54,534''$ LS dan $111^{\circ} 24' 31,213''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.12 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 53,337''$ LS dan $111^{\circ} 25' 33,725''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (Igir) Durian sampai pada TK.13 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 11,991''$ LS dan $111^{\circ} 25' 39,066''$ BT; dan

3. TK.13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) Durian sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh PBU.P-10 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 42,950''$ LS dan $111^{\circ} 26' 45,540''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

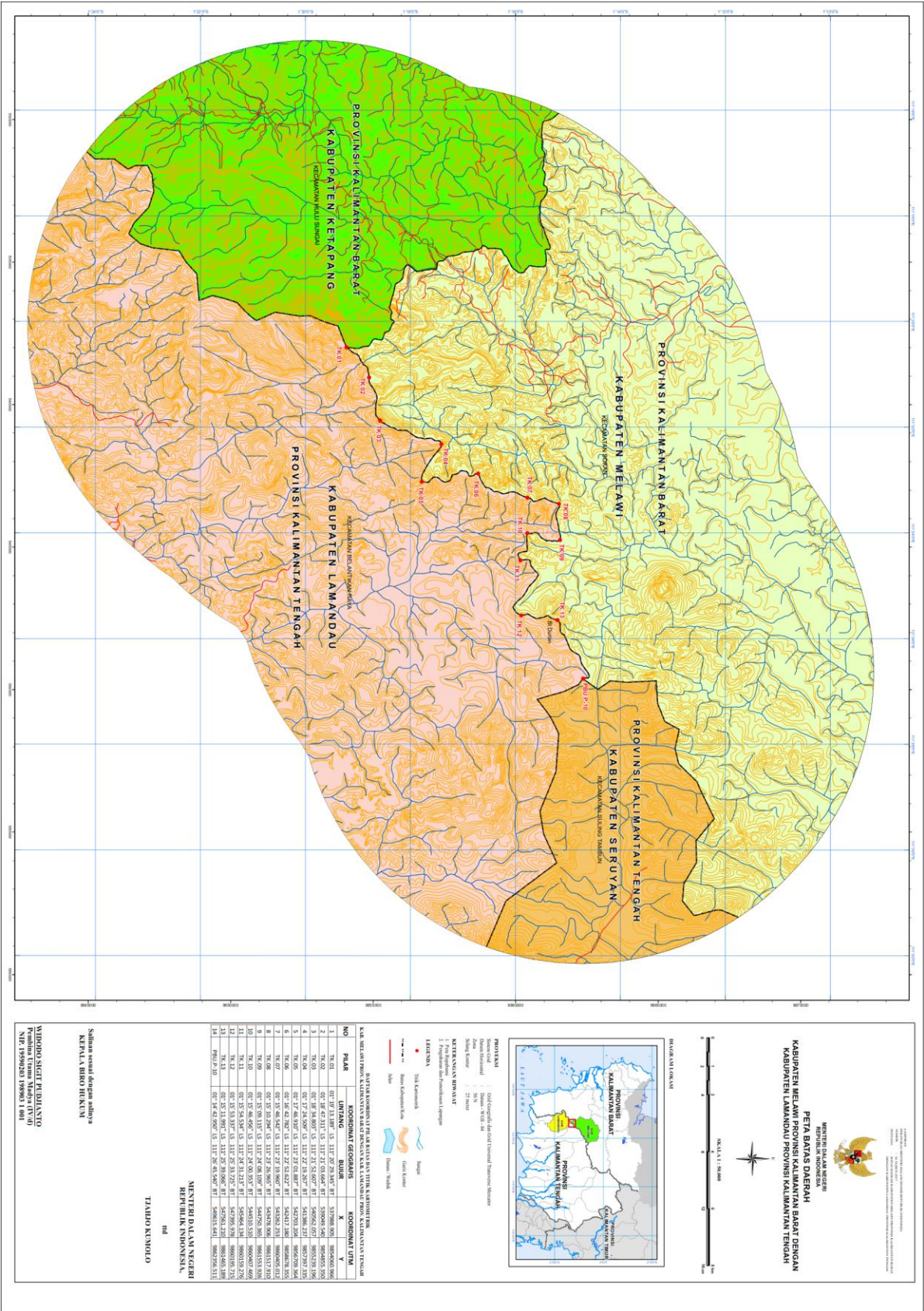
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

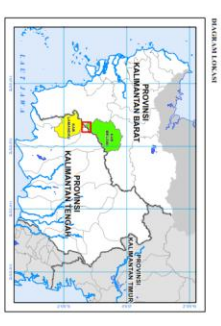
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA




 REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN MELAYU BARAT DENGAN
KABUPATEN LAMAU DAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PROJEKSI
 Datum: WGS 84
 Sistem Koordinat: UTM
 Denas: 117° 30' 00" Bujur Timur
 Denas: 2° 30' 00" Lintang Selatan
KETERANGAN BAWAH
 1. Garis merah menunjukkan batas provinsi
 2. Garis hitam menunjukkan batas kabupaten

Nama Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melayu Barat
 Nama Wilayah Kabupaten Lamau
 Nama Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	PELAK	LINTANG	BUJUR	KORDINAT GEODESIK		KORDINAT UTM
				X	Y	
1	78.01	02° 37' 31.189" S	117° 27' 28.348" BT	537986.906	896200.846	
2	78.02	02° 38' 42.111" S	117° 21' 58.658" BT	539092.906	896255.836	
3	78.03	02° 39' 53.033" S	117° 16' 29.918" BT	540278.906	896310.826	
4	78.04	02° 41' 03.955" S	117° 11' 01.178" BT	541464.906	896365.816	
5	78.05	02° 42' 14.877" S	117° 05' 32.438" BT	542650.906	896420.806	
6	78.06	02° 43' 25.799" S	117° 00' 03.698" BT	543836.906	896475.796	
7	78.07	02° 44' 36.721" S	116° 54' 34.958" BT	545022.906	896530.786	
8	78.08	02° 45' 47.643" S	116° 49' 06.218" BT	546208.906	896585.776	
9	78.09	02° 46' 58.565" S	116° 43' 37.478" BT	547394.906	896640.766	
10	78.10	02° 48' 09.487" S	116° 38' 08.738" BT	548580.906	896695.756	
11	78.11	02° 49' 20.409" S	116° 32' 39.998" BT	549766.906	896750.746	
12	78.12	02° 50' 31.331" S	116° 27' 11.258" BT	550952.906	896805.736	
13	78.13	02° 51' 42.253" S	116° 21' 42.518" BT	552138.906	896860.726	
14	78.14	02° 52' 53.175" S	116° 16' 13.778" BT	553324.906	896915.716	
15	78.15	02° 54' 04.097" S	116° 10' 45.038" BT	554510.906	896970.706	
16	78.16	02° 55' 15.019" S	116° 05' 16.298" BT	555696.906	897025.696	
17	78.17	02° 56' 25.941" S	115° 59' 47.558" BT	556882.906	897080.686	
18	78.18	02° 57' 36.863" S	115° 54' 18.818" BT	558068.906	897135.676	
19	78.19	02° 58' 47.785" S	115° 48' 50.078" BT	559254.906	897190.666	
20	78.20	02° 59' 58.707" S	115° 43' 21.338" BT	560440.906	897245.656	
21	78.21	03° 01' 09.629" S	115° 37' 52.598" BT	561626.906	897300.646	
22	78.22	03° 02' 20.551" S	115° 32' 23.858" BT	562812.906	897355.636	
23	78.23	03° 03' 31.473" S	115° 26' 55.118" BT	563998.906	897410.626	
24	78.24	03° 04' 42.395" S	115° 21' 26.378" BT	565184.906	897465.616	
25	78.25	03° 05' 53.317" S	115° 15' 57.638" BT	566370.906	897520.606	
26	78.26	03° 07' 04.239" S	115° 10' 28.898" BT	567556.906	897575.596	
27	78.27	03° 08' 15.161" S	115° 05' 00.158" BT	568742.906	897630.586	
28	78.28	03° 09' 26.083" S	114° 59' 31.418" BT	569928.906	897685.576	
29	78.29	03° 10' 37.005" S	114° 54' 02.678" BT	571114.906	897740.566	
30	78.30	03° 11' 47.927" S	114° 48' 33.938" BT	572300.906	897795.556	
31	78.31	03° 12' 58.849" S	114° 43' 05.198" BT	573486.906	897850.546	
32	78.32	03° 14' 09.771" S	114° 37' 36.458" BT	574672.906	897905.536	
33	78.33	03° 15' 20.693" S	114° 32' 07.718" BT	575858.906	897960.526	
34	78.34	03° 16' 31.615" S	114° 26' 38.978" BT	577044.906	898015.516	
35	78.35	03° 17' 42.537" S	114° 21' 10.238" BT	578230.906	898070.506	
36	78.36	03° 18' 53.459" S	114° 15' 41.498" BT	579416.906	898125.496	
37	78.37	03° 20' 04.381" S	114° 10' 12.758" BT	580602.906	898180.486	
38	78.38	03° 21' 15.303" S	114° 04' 44.018" BT	581788.906	898235.476	
39	78.39	03° 22' 26.225" S	113° 59' 15.278" BT	582974.906	898290.466	
40	78.40	03° 23' 37.147" S	113° 53' 46.538" BT	584160.906	898345.456	
41	78.41	03° 24' 48.069" S	113° 48' 17.798" BT	585346.906	898400.446	
42	78.42	03° 25' 58.991" S	113° 42' 49.058" BT	586532.906	898455.436	
43	78.43	03° 27' 09.913" S	113° 37' 20.318" BT	587718.906	898510.426	
44	78.44	03° 28' 20.835" S	113° 31' 51.578" BT	588904.906	898565.416	
45	78.45	03° 29' 31.757" S	113° 26' 22.838" BT	590090.906	898620.406	
46	78.46	03° 30' 42.679" S	113° 20' 54.098" BT	591276.906	898675.396	
47	78.47	03° 31' 53.601" S	113° 15' 25.358" BT	592462.906	898730.386	
48	78.48	03° 33' 04.523" S	113° 09' 56.618" BT	593648.906	898785.376	
49	78.49	03° 34' 15.445" S	113° 04' 27.878" BT	594834.906	898840.366	
50	78.50	03° 35' 26.367" S	112° 58' 59.138" BT	596020.906	898895.356	

Sejalan sesuai dengan adanya
KEMALU BERO HUKUM

 MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,
 id
TAJIBO KINODLO

MIMPONG SILETI BILIHANSO
 Pembantu I (umum) Menteri (T/VI)
 NIP. 19590203 198803 1 001